

ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING BERBASIS TRIPLE BOTTOM LINE THEORY DALAM Mendukung SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA BUMDES “SUMBER SEJAHTERA” DESA WISATA PUJON KIDUL

Roki' Khairullah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Widyagama Malang

Email: rokikhairullah204@gmail.com

A. Pendahuluan

Saat ini negara-negara berkembang dihadapkan pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada periode 2016 - 2030. SDGs memiliki tujuan yang luas dan menjangkau jauh, mewajibkan komponen non pemerintah, serta bersifat inklusif dan universal. SDGs disiapkan melalui siklus partisipatif yang sangat komprehensif melalui konferensi dengan semua pertemuan (pemerintah, masyarakat umum, media, akademisi, masyarakat filantropi, dan pihak swasta), baik dari negara maju maupun berkembang (SMERU, 2017). Sifat menyeluruh juga tercermin dalam kaidah “no one left behind”, tidak ada yang ditinggalkan. Tujuan terakhir pada tahun 2030 dari program SDG's adalah untuk mencapai tiga tujuan utama sebagai: menyelesaikan permasalahan kemiskinan, mencapai pemerataan, dan menjaga kualitas lingkungan.

BUMDes merupakan salah satu bentuk kepentingan daerah secara keseluruhan yang ditata berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. BUMDes juga sepakat untuk memikirkan pengalihan penggerakan desa, menciptakan potensi desa, mendayagunakan, menggunakan potensi desa, mendukung pembiayaan dan sumber daya pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes memiliki sasaran yang jelas dan diakui dengan menawarkan berbagai bentuk bantuan kepada organisasi-organisasi yang bermanfaat, idealnya bagi jaringan pedesaan yang tergolong kalangan masyarakat miskin, mengurangi aksi rentenir dan pelepasan uang. Terlebih lagi, motivasi di balik penataan BUMDes adalah untuk pemerataan bidang usaha sekaligus meningkatkan pendapatan individu (Ridlwani, 2014).

Standar dalam mengawasi BUMDes (Ridlwani, 2014), adalah sebagai berikut:

1. Kooperatif, adanya dukungan semua bagian dalam penyelenggaraan BUMDes dan dapat berjalan dengan baik satu sama lain.
2. Partisipatif, semua bagian yang terkait dengan BUMDes para pengurus diharapkan memberikan bantuan dan komitmen dengan sengaja atau tanpa pendekatan untuk lebih mengembangkan usaha BUMDes
3. Emansipatif, semua bagian yang ikut dalam penyelenggaraan BUMDes diperlakukan sama tanpa membedakan golongan, identitas dan agama;
4. Transparan, segala bentuk pergerakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan BUMDes dan mempengaruhi terhadap kepentingan umum harus terbuka dan semua lapisan masyarakat sudah paham dengan kegiatan tersebut;
5. Akuntabel, semua aktivitas secara teknis dan administratif harus dipertanggungjawabkan; Lalu,
6. Sustainable, masyarakat daerah dapat membuat dan mengembangkan kegiatan usaha di dalam BUMDes.

BUMDes “Sumber Sejahtera” sudah menerapkan semua prinsip yang ada diatas sesuai dengan visi, misi dan strategi dari BUMDes “Sumber Sejahtera” yang akan peneliti tampilkan di pembahasan nanti. BUMDes “Sumber Sejahtera” ini juga memiliki banyak unit usaha diantaranya unit toko desa, unit air bersih, unit wisata desa, ada juga yang paling terkenal yaitu unit Cafe Sawah dan banyak lainnya. Selain berfokus pada unit usaha BUMDes “Sumber Sejahtera” juga memiliki pos-pos CSR (Corporate Social Responsibility) yang diantaranya ada pos pengembangan usaha dan dana cadangan, pelatihan, pengecatan rumah, dan lain-lain. Dari pernyataan diatas ini maka BUMDes “Sumber Sejahtera” sudah memiliki tujuan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dimana dengan adanya BUMDes ini diharapkan bisa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Akuntansi Lingkungan diciptakan guna mempermudah dalam pengambilan keputusan agar dari pengelolaan anggaran dan biaya

bisa dikelola dengan baik. Dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi berperan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan atau *environmental costs*. Sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan ini disebut sebagai *green accounting* atau *environmental accounting* (Aniela, 2012).

Menurut (Belkaoui, 2000 dalam Komar ,2004) Jadi, *Green Accounting* dapat memberikan data tentang sejauh mana suatu asosiasi atau organisasi membuat komitmen positif atau negatif terhadap kualitas keberadaan manusia dan keadaan lingkungannya saat ini. Akuntansi hijau pada dasarnya adalah perpaduan antara strategi moneter dan non-moneter, secara general mengambil keputusan dari pandangan pemeriksaan biaya dan dampak lingkungan dari pendekatan bisnis yang dilakukan. CSR sendiri merupakan perangkat bagi organisasi untuk menunjukkan kewajibannya terhadap lingkungan dari hasil yang diperolehnya. Perusahaan akan terus menggunakan *green accounting* melalui *corporate social responsibility (CSR)*. Akibatnya, komponen lingkungan CSR dapat mendukung akuntansi hijau secara keseluruhan (Alvinaldi, 2013 dalam (erviana, 2017)).

Peneliti menggunakan teori *Triple Bottom Line* dari semua penjelasan yang tercantum di atas. Mempertimbangkan ekonomi berkelanjutan (*Sustainable Development*), yang menekankan pada pelestarian alam (*planet*) sebagai sumber dari semua sumber daya, kesejahteraan komunitas atau orang (*people*), dan menghasilkan keuntungan (*profit*) yang cukup untuk memastikan kelangsungan eksistensi perusahaan (Stephanus, 2015). Hal ini sesuai dengan kajian lain yang mengungkapkan *Triple Bottom Line* memberikan pandangan bahwa, untuk menjaga daya tahan perusahaan, maka pada saat itu organisasi harus fokus pada “3P”, selain mencari keuntungan, organisasi harus demikian juga fokus dan dikaitkan dengan pemenuhan bantuan terhadap masyarakat dan secara efektif membantu pengelolaan lingkungan. (Wibisono, 2007 dalam Hanifah, 2013).

B. Teori dan Konsep

Yang dimaksud dengan “pembangunan berkelanjutan” adalah suatu metode pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bahkan budaya yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan atau merusak kebutuhan generasi mendatang. Istilah “pembangunan berkelanjutan” atau “sustainable development” sebenarnya sudah ada sejak lama, baik dalam skala nasional maupun global. Namun, implementasinya masih kurang dipahami, mengakibatkan banyak kekurangan kebijakan dan peraturan. Dan selanjutnya masih memiliki banyak efek samping dalam permintaan eksekusi atau pelaksana. Sesuai (Harris, 2009) bahwa gagasan keberlanjutan dapat dijelaskan menjadi tiga bagian pengertian, yaitu:

1. Ekonomi yang berkelanjutan; yang dicirikan sebagai kemajuan yang mampu melahirkan tenaga kerja dan produk secara terus-menerus untuk mengimbangi administrasi dan menghindari terjadinya benturan sektoral yang dapat merugikan agraria dan kreasi modern.
2. Lingkungan yang berkelanjutan: Kerangka kerja yang mendukung bumi harus dapat mengimbangi sumber daya yang stabil, menghindari penggunaan ganda sumber daya alam dan mengasimilasi kemampuan iklim. Pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan lima fungsi ekosistem tambahan yang tidak termasuk dalam kategori sumber daya ekonomi juga termasuk dalam konsep ini.
3. Masyarakat yang berkelanjutan; organisasi sosial dicirikan sebagai kerangka kerja yang cocok untuk mencapai keadilan, pengaturan administrasi sosial termasuk kesejahteraan, instruksi, orientasi, dan tanggung jawab politik.

Akuntansi hijau terkait dengan pembangunan berkelanjutan ketika organisasi memiliki kekhawatiran terhadap masalah ekologis. Organisasi mempunyai perhatian dengan lingkungan di sekitarnya. Berikutnya sebuah organisasi dikatakan sangat memperhatikan ketika berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan atau konservasi. Hal ini harus diikuti oleh pembukuan ekologis yang terungkap dalam organisasi dan dari sini dalam organisasi penting untuk mengungkap perincian akuntansi

lingkungan sehingga organisasi serta menjaga dan melindungi lingkungan juga dapat melanjutkan bisnisnya karena mengkhawatirkan wilayah yang melingkupinya, baik sosial maupun lingkungannya. Akibatnya, akuntansi lingkungan atau Green Accounting dalam hal ini, harus menggantikan sistem akuntansi saat ini yang hanya berfokus pada keuntungan (profit). Ada beberapa biaya yang digunakan sebagai tanda Green Accounting adalah sebagai berikut:

1. Biaya pencegahan lingkungan (environmental prevention costs) akan menjadi biaya untuk kegiatan yang dilakukan untuk mencegah produksi limbah dan juga pemborosan yang menyebabkan kerusakan alam.
2. Biaya deteksi lingkungan (environmental detection costs) akan menjadi biaya untuk kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan apakah produk, proses dan kegiatan lain dalam organisasi memenuhi pedoman lingkungan yang relevan atau tidak.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (environmental interna failure costs) akan menjadi biaya untuk kegiatan yang dilakukan karena produksi limbah dan sampah, namun tidak dibuang ke lingkungan luar.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure costs) adalah biaya yang timbul setelah pembuangan sampah atau limbah ke lingkungan.

Penggunaan Akuntansi hijau dikaitkan dengan perhatian mereka terhadap lingkungan aktual, dan ini sesuai dengan perhatian Triple bottom line yang merupakan pengelola dan perhatian bagi suatu organisasi. Triple bottom line telah berubah menjadi isu yang signifikan dan telah dikaji pada peristiwa yang berbeda dan dikemas dalam tiga pilar keuntungan, lingkungan dan sosial. Bahwa perhatian Triple bottom line tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mempedulikan orang-orang dan lingkungan di sekitar mereka. Selain itu juga menunjukkan bahwa teori legitimasi bergantung pada kesepakatan umum yang terjadi antara organisasi dan masyarakat wilayah tempat organisasi bekerja dan menggunakan sumber daya keuangan. Ketiga hal tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

1. Profit, Organisasi bagaimanapun juga harus diposisikan untuk mencari laba (profit) untuk terus berkarya dan berkembang. Keuntungan ini merupakan unsur utama dalam pergerakan ekonomi, karena tujuan suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan dengan meningkatkan efisiensi produksi dan membuat efisiensi biaya.
2. People, Organisasi untuk situasi ini seharusnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan program CSR antara lain memberikan hibah di bidang pendidikan, administrasi kesejahteraan yang mencakup masalah hubungan masyarakat daerah, penguatan kesehatan daerah dan administrasi daerah yang dibicarakan dengan pemerintah daerah dan jaringan sekitarnya. perusahaan.
3. Planet, Perusahaan harus peduli terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati dalam jangka panjang. Program CSR antara lain menyelesaikan penghijauan lingkungan, memberikan air bersih ke daerah setempat dan mengembangkan permukiman lebih lanjut, dan sebagainya.

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Dalam lingkup lebih kecil, kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut diantaranya berbentuk badan usaha, atau badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, karenanya panduan awal pembentukan dan pengelolaan BUMDes mesti tersedia. Dalam lingkup pemerintahan daerah, panduan pembentukan dan pengelolaan BUMDes dapat dituangkan dalam peraturan daerah. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa".

Rumusan yang sama diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- mengembangkan kehidupan demokrasi;
- mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- mengembangkan sistem jaminan sosial;
- menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- melestarikan lingkungan hidup;
- mengelola administrasi kependudukan;
- melestarikan nilai sosial budaya;
- membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari poin-poin peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 diatas dapat terlihat bahwa adanya kewajiban diatas sesuai dengan indikator yang terdapat pada Triple Bottom Line Theory yaitu adanya perhatian terhadap Planet, People, dan Profit.

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Akuntansi hijau diperlukan dalam suatu organisasi sebagai transparansi. Pelestarian lingkungan akan dilakukan dengan menganggarkan biaya yang berhubungan dengan lingkungan. BUMDes Sumber Sejahtera yang melengkapi bisnis pariwisata berbasis alam dalam pelaksanaannya berubah menjadi kebutuhan untuk fokus pada lingkungan, sehingga organisasi akan

memperoleh legitimacy dari daerah setempat. Kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera dengan tujuan untuk menjaga lingkungan tentu menimbulkan biaya bagi BUMDes, tetapi hal tersebut masih akan disebabkan oleh BUMDes karena merupakan komitmen BUMDes untuk mengikuti keadaan mereka saat ini sehingga mereka layak dan menjalankan aktivitas usaha tanpa merusak lingkungan. Perlakuan ekologis BUMDes Sumber Sejahtera dalam fokus pada isu-isu lingkungan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Stakeholder. Pada BUMDes Sumber Sejahtera, green accounting berbasis kegiatan lingkungan telah menimbulkan biaya lingkungan, namun akuntansi konvensional masih digunakan untuk pencatatannya.

BUMDes Sumber Sejahtera terus berupaya memperluas laba BUMDes (Profit) sesuai dengan tekad untuk memberikan kontribusi positif yang sebanyak-banyaknya bagi warga (people) dan lingkungan sekitarnya (planet). Selanjutnya adalah penjelasannya:

- *Green accounting* ditinjau dari *planet*

Kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera dengan tujuan akhir untuk menyelamatkan lingkungan akan menimbulkan biaya, disinilah tugas akuntansi hijau sebagai pemaparan. Konservasi biaya lingkungan yang ditanggung BUMDes tercantum di bawah ini:

Tabel 1. List pengeluaran lingkungan BUMDes Sumber Sejahtera

No.	Kegiatan biaya lingkungan
1.	Biaya transportasi pembuangan limbah residu ke TPA
2.	Biaya gaji karyawan dan operasional lingkungan
3.	Biaya servis kendaraan operasinal lingkungan
4.	Biaya pos pelestarian lingkungan

Sumber : diolah peneliti 2023

Berbagai organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, harus memiliki pilihan untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk kewajiban ekologis. Mengingat saat ini organisasi diharapkan menghasilkan keuntungan, namun juga harus fokus pada kewajiban lingkungan dan sosial.

- *Green accounting* ditinjau dari *people*

Kebijakan strategis yang berkeadilan dan memberi benefit bagi buruh, jaringan masyarakat dan daerah tempat BUMDes menjalankan usahanya akan sangat mempengaruhi pengelolaan BUMDes. BUMDes bukanlah suatu substansi yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri, tetapi seharusnya bisa memberi benefit bagi kelompok lain, contohnya lingkungan sekitar BUMDes. Jika suatu BUMDes berkeinginan untuk diproklamasikan sebagai BUMDes yang mampu, bertanggung jawab dasarnya adalah mengetahui secara tepat dampak dari tugasnya, baik negatif maupun positif. Kewajiban BUMDes untuk memperlakukan pekerja secara berakhlak dan santun, serta memberikan kesadaran yang adil dan hal tersebut telah diselesaikan oleh BUMDes Sumber Sejahtera dengan memberikan tarif upah yang sesuai dengan kemampuan dan bidang yang digeluti setiap hari. Pada saat para pekerja BUMDes diaktifkan, organisasi tidak lupa mengingat kewajiban mereka terhadap daerah sekitar BUMDes. Berikutnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera untuk daerah setempat.

Tabel 2. Aktivitas-aktivitas BUMDes Sumber Sejahtera terhadap masyarakat

No.	Nama aktivitas-aktivitas sosial pada BUMDes
1.	Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat
2.	Dana Pendidikan dan pengembangan SDM
3.	Studi Banding dengan instansi
4.	Pengajian rutin perbulan setiap hari jumat
5.	Bersih-bersih desa
6.	Bedah rumah warga
7.	Sumbang dana acara HUT desa
8.	Bantuan sosial untuk rumah tangga kurang mampu
9.	Corporate Social Responsibility

Sumber : diolah peneliti 2023

Proyek-proyek yang sudah selesai diharapkan bisa membuat atau membentuk kehidupan daerah setempat menjadi lebih makmur dan mandiri. Menumbuhkan aktivitas yang timbal balik, konsisten dan kreatif dalam menggarap hakikat keberadaan manusia. Program memerlukan kekuatan untuk komitmen, dukungan aktif, dan kejujuran dari setiap orang yang peduli. Program tersebut diharapkan mampu membingkai atau mewujudkan kehidupan daerah yang lebih sejahtera dan mandiri.

c. *Green accounting* ditinjau dari *profit*

Badan Usaha Milik Desa tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomis dan BUMDes Sumber Sejahtera yang tetap mendukung keberlangsungan usahanya dengan mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan hak-hak lain seperti membayar biaya ekologi dan menolong warga sekitar perusahaan harus tetap berorientasi pada pencarian keuntungan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk terus beroperasi dan berkembang. Perusahaan didorong untuk secara sukarela berkontribusi pada peningkatan kehidupan sosial dan lingkungan yang sehat dengan Teori *Triple Bottom Line* ini.

Model *Sustainable development* yang dapat didukung tergantung pada tiga poin utama dukungan, yang masing-masing dari ketiganya saling terkait, yaitu pertama, masyarakat, terkait dengan pekerjaan daerah setempat, kewajiban, komunikasi sosial, perilaku daerah setempat dan keadaan sosial. individu dalam suatu ruang. Kedua, lingkungan, yang berhubungan dengan daerah setempat, termasuk lingkungan aktual dan adanya sekumpulan organisasi karena buatan manusia dalam sistem pemanfaatannya. Ketiga, ekonomi, khususnya bantuan pemerintah daerah keuangan daerah dan pemanfaatan lingkungan setempat untuk mengatasi masalah daerah mengingat untuk pengaturan mendapatkan keuntungan. BUMDes Sumber Sejahtera telah menyelesaikan kewajiban sosial dan ekologi pada daerah sekitar BUMDes yang berdampak secara langsung, penjelasannya terungkap dalam catatan laporan keuangan BUMDes. Dalam hal laporan tahunan, BUMDes sekarang terbuka.

D. Pendekatan

Dengan melihat aktivitas lingkungan dari perspektif biayanya terhadap lingkungan serta manfaatnya bagi ekonomi, green accounting bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. Akuntansi hijau diterapkan oleh organisasi yang berbeda untuk memberikan evaluasi kuantitatif dari biaya dan efek keamanan lingkungan. Adapun sebagian dari target penyelenggaraan green accounting antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan tanggung jawab substansi dan menumbuhkan transparansi terhadap lingkungan.
2. Pada kegiatan sosial hubungan instansi bisnis dengan masyarakat, khususnya, dengan aktivis lingkungan dan kelompok pengamat, membantu entitas dalam mengembangkan strategi untuk menanggapi masalah lingkungan.
3. Memberikan citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh dana dari kelompok dan individu, seiring dengan tuntutan etis dari para penyandang dana.
4. Memberdayakan pembeli untuk membeli produk hijau dan akibatnya memberikan entitas tersebut keunggulan tampilan yang lebih kompetitif dibandingkan dengan entitas lain yang tidak menerapkan.
5. Buktikan dedikasi organisasi terhadap upaya perbaikan lingkungan.
6. Mencegah opini publik yang negatif, mengingatkan bisnis yang beroperasi di daerah yang tidak ramah lingkungan biasanya menerima tantangan masyarakat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksplorasi yang ditemukan oleh peneliti dan didukung dengan teori-teori pendahulu, sangat mungkin beralasan bahwa BUMDes Sumber Sejahtera telah menimbulkan biaya bagi lingkungan. Biaya pengurusan limbah, biaya pengawasan lingkungan, biaya pelatihan karyawan, biaya recycle limbah, dan kegiatan lingkungan lainnya telah dilakukan. Dengan demikian, penggunaan Akuntansi hijau belum ditambah karena biaya yang disebabkan oleh lingkungan tidak secara jelas dirinci dalam ringkasan anggaran dan masih digabungkan Bersama dengan biaya-

biaya lainnya. Hal itu disebabkan BUMDes Sumber Sejahtera masih memakai sistem pembukuan umum yang hanya mengklasifikasikan pemasukan dan pengeluaran sehingga kegiatan tentang lingkungan dan perbaikan yang dapat didukung diteruskan langsung ke setiap direktur tentang kegiatan yang harus dilakukan mulai saat ini untuk kedepannya. Pengeluaran BUMDes Sumber Sejahtera untuk lingkungan belum seperti yang diharapkan, organisasi pada umumnya mengeluarkan biaya-biaya tanpa tahu arah yang jelas. Karena hal ini tidak tercermin dalam laporan keuangan, menjadikan biaya itu menjadi tidak tampak, serta biaya lain yang di keluarkan menjadi tersembunyi. Hal ini karena perusahaan sebenarnya menggunakan pembukuan tradisional, sehingga biaya untuk lingkungan tidak terlihat. Pemahaman BUMDes Sumber Sejahtera tentang green accounting lebih menitikberatkan pada kegiatan lingkungan daripada pengertian green accounting itu sendiri, sehingga terdapat sedikit perbedaan antara keduanya. Upaya yang dilakukan BUMDes Sumber Sejahtera belum mencerminkan Akuntansi hijau yang sebenarnya. Meskipun demikian, dari aspek ekologi, moneter dan sosial dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, dapat dikatakan bahwa mereka sesuai dengan bentuk Triple bottom line dan mendukung Sustainability development. Namun usaha yang dilakukan oleh BUMDes seharusnya dapat dirincikan dengan baik dan jelas mengenai biaya lingkungannya dalam laporan keuangannya agar transparan sehingga aktivitasnya dapat terlihat dengan jelas. Sebagai alasan bagi BUMDes, khususnya BUMDes Sumber Sejahtera untuk memenuhi kewajibannya terkait lingkungan, transparan untuk pemangku kepentingan dan lebih jauh lagi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

F. Referensi

- A.B.Susanto. (2007). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.
- Aida. (2022). Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Menurut Ahli. *MA AL Ahrom*, 1.
- Aniela, Y. (2012, January). Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1).

- Burrell, G. d. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life*. London: Heinemann Educational .
- Edwards, d. T. (1994). *The Hard Press Researcher*. London: Longman.
- erviana, I. (2017). Penerapan Green Accounting Berdasarkan Triple Bottom Line Theory Untuk Mendukung Sustainability Development. *Repository UIN Alauddin Makassar*, 80-81.
- Harris, J. M. (2009). Basic Principles of Sustainable Development. In R. S. Kamaljit S. Bawa, *Dimensions of Sustainable Development* (pp. 21-40). Oxford, United Kingdom: EOLSS Publisher.
- Institute, S. R. (2017). *Dari MDGs Ke SDGs: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret* (2 ed., Vol. 2). (L. Hadiz, Ed.) Jakarta: Buletin SMERU No.2/2017. Retrieved January 29, 2023, from <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/news/201702.pdf>
- Keraf, A. S. (1998). *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Karsinus.
- Komar, S. (2004). Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Social Responsibility Accounting) dan Korelasinya dengan Akuntansi Islam. *Media Akuntansi*, 54-58.
- Kurniawan, A., & Mustofa, U. A. (2022). Penerapan Akuntansi Lingkungan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan Green Accounting Badan Usaha Milik Desa Adijaya Lampung Tengah. *Fidusia*, 87-98.
- Margono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir, A., Masuni, A. W., & Anwar, S. A. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan Green Accounting (Studi Kasus Di Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *JRA*, 106-112.
- Nasution, H., & Agustin, S. A. (2020). Analisis Aktivitas Dan Biaya Lingkungan Dalam Mewujudkan Green Accounting Pada Bumdes Setia Asih. *Jurnal PETA*, 17 - 35.
- Nawawi, H. (2015). *"Manajemen Sumber Daya Manusia : Untuk Bisnis Yang kompetitif"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Pembudi, T. S. (1997). *CSR suatu keharusan dalam Investasi Sosial*. Jakarta: Puspinsos.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedurnya*. Malang: UIN Malik Ibrahim Malang.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 424-440.
- Stephanus, D. (2015, mei 15). *Triple Bottom Line: Menggagas Bisnis dan Aktivitas Ekonomi Yang Bertanggung Jawab Pada Bumi, Manusia Dan Entitas Ekonomi*. Retrieved Febuari 02, 2023, from <https://daniels-stephanus.blospot.co.id/2015/15/05triple-bottom-line-menggagas-bisnis-dan.html>.
- Suningsih, S. Y., Pramitari, I. A., & Mandia, I. N. (2021). Analisis Implementasi Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa : Studi Kasus pada Unit Pemungutan Sampah BUMDes Buduk Bandung. *JBK*, 71-77.
- Wulandari, R., Natasari, D., & Arifin, I. F. (2019). Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan Green Accounting (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa "X"). *MONEX*, 169-188.



Roki' Khairullah, lahir pada 16 Juli 2000 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Anak pertama dari dua bersaudara. Berstatus aktif sebagai mahasiswa program Sarjana Ekonomi dan Bisnis di Jurusan Akuntansi, Universitas Widyagama Malang tahun 2019 – 2023.